

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka dan perbandingan kepada penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sebagai referensi. Kemudian penulis membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, melalui tabel sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhan (2018) Universitas Air-Rainiry, Aceh yang berjudul Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya). Penelitian ini membahas tentang dinasti Ampon Bang di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat, untuk mengisi posisi Bupati ditunjuk H.T Zulkarnain atau dikenal dengan nama “Ampon Bang” sebagai Penjabat (PJ).

Setelah diadakan Pilkada di Kabupaten Nagan Raya, Ampon Bang mencalonkan diri dan berhasil terpilih selama 2 periode. Selama 15 tahun kekuasaan Ampon Bang di Kabupaten Nagan Raya, Ampon Bang membangun dinasti politik dengan menempatkan keluarga dan kerabat terdekatnya di posisi birokrat dan ketua DPR Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan oleh Ilham Ramadhan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara mendalam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, penulis menyoroti bagaimana latar belakang terciptanya dinasti politik di Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020 dan faktor-faktor yang membuatnya bertahan. Sedangkan penelitian diatas membahas strategi yang digunakan Ampon Bang dalam membangun dinasti politik di Kabupaten Nagan Raya setelah berkuasa selama 15 tahun.

Kedua, penelitian yang dilakukan Mhd. Al Fajri Sukri (2020) yang berjudul Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengangkat faktor penyebab dinasti politik keluarga Atut masih bertahan di Banten walaupun aktor dinasti tersebut, yaitu Atut terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Penelitian ini juga membahas mengenai bentuk dinasti politik keluarga Atut yaitu Octopussy Dynasty, dengan memanfaatkan jaringan kekuasaan yang telah dibangun oleh ayah Atut, Tubagus Chasan Sohib. Keluarga Atut berhasil memenangkan beberapa Pilkada di Banten setelah Atut di tangkap oleh KPK, hal ini dikarenakan akar dinasti yang sudah kuat, strategi politik yang baik, dan juga rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diatas menganalisis bentuk dinasti Atut di Banten dengan menggunakan teori familisme. Penelitian diatas juga membahas mengenai faktor penyebab dinasti Atut tetap eksis Banten dan masih memenangkan beberapa Pilkada di Banten. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih spesifik menyoroti dinasti Atut di Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020 dengan membahas latar belakang terciptanya dan faktor apa yang membuat dinasti dapat bertahan di Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020.

Ketiga, penelitian oleh Novendra Bimantara yang berjudul Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri. Penelitian ini membahas mengenai asal-usul terjadinya dinasti politik keluarga Sutrisno di Kabupaten Kediri dan bagaimana dinasti Sutrisno bekerja serta mempertahankan dinastinya. Sutrisno membangun dinasti politiknya setelah 10 tahun menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2009, Istri dari Sutrisno yaitu Haryati terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Kediri menggantikan Sutrisno dan menjabat selama 2 periode. Tidak hanya Haryati, adik kandungnya menjabat sebagai ketua DPRD Kediri. Penelitian ini menemukan bahwa untuk membentuk dinasti di Kabupaten Kediri, Sutrisno mempunyai relasi dengan elit lokal seperti tokoh ulama, kyai pemilik pesantren, elit partai politik, dan pejabat pemerintahan desa.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas ialah, objek penelitian yang penulis lakukan ialah di Kota Tangerang Selatan serta penulis mengangkat masalah bagaimana dinasti Atut tercipta dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Sedangkan penelitian diatas membahas bagaimana dinasti di

Kabupaten Kediri terjadi, cara mempertahankan dan bagaimana dinasti Sutrisno di Kediri bekerja.

II.2 Kerangka Teori

II.2.1. Oligarki

Teori Oligarki dikemukakan oleh Jeffrey Winters. Sebelum mendefinisikan oligarki, Winters mendefinisikan apa itu oligark terlebih dahulu kemudian menjelaskan oligarki. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan sumber daya material yang besar, yang kemudian dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya itu harus tersedia dan digunakan demi kepentingan pribadi, biarpun tidak harus dimiliki sendiri.¹

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami oligark dan membedakannya dengan elit, Winters membuat tiga hal yang bersangkutan dengan oligark.² Pertama, bagi oligark kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang beda dari sumber daya kekuasaan lain yang bisa terkonsentrasi di tangan minoritas. Kedua, yang penting adalah bahwa penguasaan dan pengendalian sumber daya itu dilakukan untuk kepentingan pribadi bukan lembaga. Ketiga, definisi oligark tetap akan seperti ini di berbagai zaman dan berbagai kasus.³

Setelah mendefinisikan oligark, Winters kemudian mendefinisikan oligarki yang merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang

¹ Jeffrey Winters, *Oligarki*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 8.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

memiliki kekayaan material.⁴ Oligark mempunyai masalah dan tantangan politik yang terkait langsung dengan sumber daya kekuasaan material yang mereka miliki, yaitu ancaman terhadap hak milik karena harta dan kekayaan yang luar biasa. Sehingga dinamika politik mereka hanya seputar ancaman kepemilikan tersebut dan bagaimana mempertahankan kekayaan.⁵ Winters mengelompokkan dua komponen pertahanan kekayaan untuk oligark yaitu pertahanan harta (*property defense*) yaitu mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik dan pertahanan pendapatan (*income defense*) yaitu menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman.⁶

Oligarki tidak didefinisikan berperan dalam posisi penguasa atau pemerintahan, mereka bisa menjadi memerintah tapi tidak harus menjadi pemerintah. Maka dari itu, posisi oligark yang tidak mempunyai peran dalam pemerintahan tidak berpengaruh pada keberadaannya. Karena mereka merupakan pelaku yang menguasai sumber daya kekuasaan tertentu. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan pengaruh minoritas berkat sumber daya material yang telah mereka kumpulkan secara pribadi dan akan mereka pertahankan.⁷

Hubungan antara uang dan kekuasaan tidak bisa dielakan dalam studi politik, ketidaksetaraan besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan besar dalam kekuasaan dan pengaruh politik dalam demokrasi.⁸ Seorang kandidat politik yang memiliki kekayaan besar dalam pemilu dapat menang dengan mudah

⁴ *Ibid*, hal. 10.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hal. 59.

⁸ *Ibid*.

dibandingkan kandidat yang kekayaannya sedikit. Gerakan politik yang dananya lancar lebih berpengaruh dibandingkan dengan yang memiliki dana macet. Lembaga kementerian yang memiliki dana besar lebih memiliki kekuasaan yang besar.⁹

Tujuan utama seorang oligark adalah mengamankan dan memelihara posisi kekayaan dan kekuatannya terhadap segala bentuk ancaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka menambah kekayaan, terutama jika penambahan itu didorong makin besarnya biaya pertahanan kekayaan karena hanya oligark yang mempertahankan kekayaannya melalui kekayaan.¹⁰ Oligarki tidak merujuk pada sistem kekuasaan oleh terlembaga, tetapi sejumlah kecil individu kaya yang bukan hanya berkuasa karena sumber daya material, melainkan juga terpisah karena berkonflik dengan bagian besar komunitas.¹¹

Terdapat empat tipe oligarki yang dikelompokan oleh Winters yaitu Oligarki Panglima, Oligarki Penguasa Kolektif, Oligarki Sultanistik, dan Oligarki Sipil. Keempat tipe oligarki tersebut dikelompokan Winters berdasarkan tiga ciri utama yaitu:

1. Sifat ancaman terhadap kekayaan yang datang luar,
2. Kadar keterlibatan langsung oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas kekayaan,
3. Keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintah.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hal 59.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hal. 48

A. Oligarki Panglima

Oligarki panglima terjadi pada kondisi ketika klaim atas wilayah sumber kekayaan saling tumpang tindih, karena tidak adanya otoritas yang bisa mengatur masalah penegakan atas klaim kekayaan. Otoritas yang mengatur klaim kekayaan biasanya tidak bertahan lama karena berasal dari kalangan oligark itu sendiri yang dilawan oleh para oligark itu sendiri pula dengan senjata. Melalui sumber daya pemaksaan dan materil oligarki panglima mengamankan kekayaannya dari ancaman pihak lain.¹³

B. Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki penguasa kolektif terjadi ketika para oligark berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Oligark penguasa kolektif membagi biaya kekuatan pemaksa, antara yang mereka bayar dan gunakan sendiri (terutama di pedesaan di luar ibu kota) dengan yang dibayar dan digunakan bersama aparat setengah-negara yang mereka perintah langsung.¹⁴

C. Oligarki Sultanistik

Oligarki sultanistik merupakan bentuk oligarki yang ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu oligark, bukan negara terlembaga yang dibatasi hukum. Di dalamnya marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Penegakan hukum, wewenang dan kekerasan hanya atau sebagian besar dikuasai penguasa, yang kestabilan posisinya di puncak rezim, terutama di atas para oligark kuat yang ada

¹³ *Ibid*, hal. 52.

¹⁴ *Ibid*.

di bawahnya sangat bergantung kepada penyediaan pertahanan harta dan pendapatan bagi para oligark secara keseluruhan.¹⁵

D. Oligarki Sipil

Oligarki sipil bekerja dengan para oligarknya menyerahkan sebagian besar kekuasaan mereka kepada pemerintah tak-pribadi dan terlembaga di mana hukum lebih kuat daripada semua individu. Dengan tersedianya pertahanan harta oleh negara, pertahanan kekayaan dalam oligarki sipil terpusat pada pertahanan pendapatan. Oleh karenanya politik pertahanan kekayaan oligark bergeser, oligark akan berusaha menghindar dari jangkauan tangan negara yang hendak meminta pajak atau redistribusi kekayaan.¹⁶

II.2.2 Dinasti Politik

Dinasti politik menurut Pablo Querubin adalah distribusi kekuasaan yang di dominasi oleh satu atau sejumlah kecil keluarga di wilayah geografis tertentu.¹⁷ Sedangkan menurut Leo Agustino, dinasti politik merupakan upaya penguasa meletakkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu “kerajaan politik” di dalam ranah pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal.¹⁸

Strategi menempatkan keluarga dalam jabatan politik selain membangun kerajaan politik juga supaya keluarga tersebut saling menjaga agar kekal dalam kekuasaan dan mengendalikan semua hal yang diperlukan oleh keluarga yang

¹⁵ *Ibid*, hal. 53.

¹⁶ *Ibid*, hal. 54

¹⁷ Hatta Abdi Muhammad dan Dony Anggara, *Dinasti Politik pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari 2020: Analisis Perilaku Pemilih*, JISPO, 11(1), 111-132, hal. 117.

¹⁸ Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, ALFABETA, 2014, hal. 210.

berkuasa tersebut.¹⁹ Dinasti politik umumnya dijalankan oleh kelompok elit sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan keputusan politik, sehingga dengan mudah menjangkau kekuasaan dan memperebutkan kekuasaan.

Kekuasaan dinasti ini tersebar dalam semua ranah yang ada di daerah baik eksekutif, legislatif, sampai kepada pengurus internal partai politik. Dengan tersebarnya kekuasaan dinasti di legislatif dan eksekutif, mereka dapat mengendalikan kekuasaan politik dan tentunya juga ekonomi.

Dinasti politik tentunya dijalankan oleh elit yang sudah lama mempunyai kekuasaan politik. Kemudian untuk mempertahankan kekuasaan, elit ini mendorong keluarganya untuk terus memegang kekuasaan politik dengan cara yang demokratis. Keturunan elit tersebut dipersiapkan dalam sistem dan rekrutmen politik sehingga ketika muncul sebagai pejabat politik, kemunculannya bukan akibat *background* keluarganya melainkan masuk ke dunia politik dari bawah. Walaupun terkadang gelar pendidikan dapat dibeli dengan nama keluarga.²⁰

II.2.3 Teori Elit

Dalam masyarakat terdapat perbedaan salah satunya ialah perbedaan keunggulan yang dimiliki satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang mempunyai keunggulan ini akan tergabung dalam kelompok elit. Menurut para pemikir elit, seperti Vilfredo Pareto, Gaetona Mosca, dan Suzanne Keller elit adalah kelompok

¹⁹ *Ibid*, hal. 211.

²⁰ Masda Putri Amelia, Skripsi: *Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota Probolinggo*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015, hal. 12

atau golongan yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.²¹ Keunggulan yang dimiliki oleh sekelompok elit akan menempatkannya dalam posisi pemimpin di masyarakat. Maka dari itu, akan lahir kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah. Kelompok yang memerintah secara alamiah berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang diperintah.

Adanya kelompok yang memerintah dan diperintah membuat Pareto dan Mosca memisahkan masyarakat menjadi dua lapisan yaitu *elite* dan *non-elite*. Lapisan *elite* dipisahkan menjadi dua bagian yaitu *governing elite* dan *non-governing elite*. *Governing elite* adalah kelompok elit yang sedang memerintah dan menduduki jabatan-jabatan politis. *Non-governing elite* adalah kelompok yang tidak sedang memerintah dan tidak menduduki jabatan politis tetapi mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.²²

Dalam kelompok elit yang berkuasa, distribusi kekuasaan harus terjadi. Terdapat beberapa model dalam melakukan distribusi kekuasaan di masyarakat salah satunya ialah model elitis. Model elitis berangkat dari pendapat Mosca tentang lapisan masyarakat, bahwa kelompok yang memerintah jumlahnya lebih sedikit, menjalankan fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan. Sementara kelompok yang diperintah, jumlahnya lebih banyak dan dikendalikan oleh

²¹ Haryanto, *Elit, Massa, dan Konflik: Suatu Bahasan Awal*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial UGM, 1991, hal. 3.

²² *Ibid*, hal. 7.

kelompok yang memerintah dengan cara yang terkadang bersifat sah namun terkadang bersifat sewenang-wenang. Model ini mengasumsikan bahwa dalam masyarakat tidak pernah ada distribusi kekuasaan yang merata. Terdapat beberapa pendapat Mosca bahwa:

1. Kekuasaan politik tidak didistribusikan secara merata,
2. Masyarakat hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya,
3. Kelompok elit dapat mengatur kelangsungan hidupnya atau dikenal dengan istilah *self perpetuating*. Keanggotaan kelompok elit berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas. Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang,
4. Kelompok elit mempunyai sifat otonom, kebal akan gugatan dari luar kelompok, dan segala persoalan politik diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok.²³

Tipe kelompok elit salah satunya adalah tipe elit yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Tipe ini mempunyai sifat tertutup dan menolak golongan lain untuk memasuki kelompoknya serta berupaya untuk mempertahankan kekuasaan. Aspirasi dan tuntutan yang ada dalam masyarakat tidak menjadi perhatian dalam kelompok ini, karena pemenuhan kepentingan golongannya menjadi hal yang lebih penting.

²³ *Ibid*, hal.67.

II.3 Kerangka Pemikiran

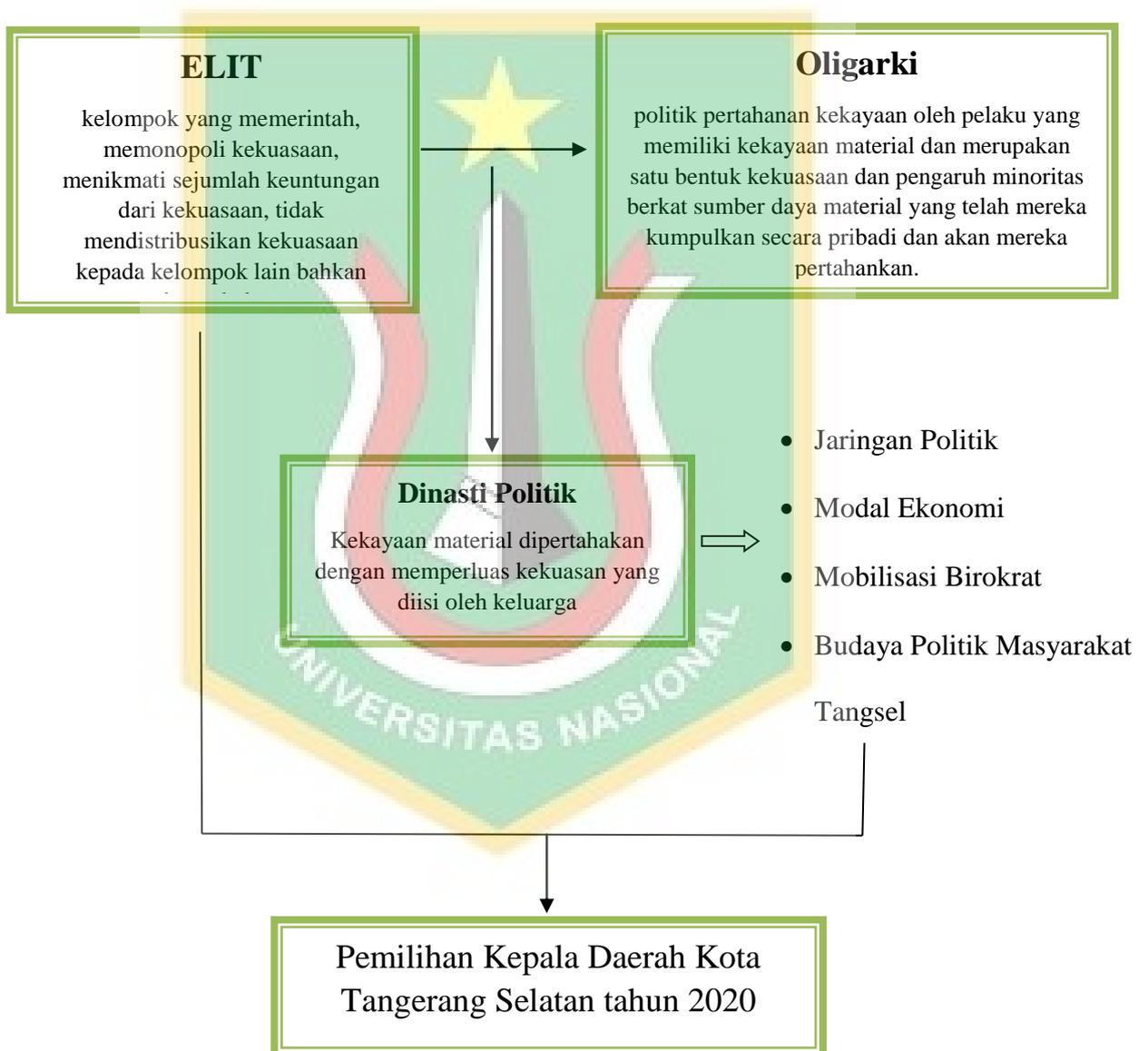
Dinasti politik yang ada di Kota Tangsel diciptakan oleh keluarga Atut dengan bertujuan untuk memperbesar kekuasaan keluarganya dan untuk mengendalikan hal yang diperlukan untuk kepentingan keluarga, dalam konteks ini adalah mengendalikan kekuasaan ekonomi melalui APBD.

Berdasarkan uraian diatas, dinasti Atut merupakan elit, karena mereka merupakan kelompok yang memerintah, memonopoli kekuasaan, menikmati sejumlah keuntungan dari kekuasaan, tidak mendistribusikan kekuasaan kepada kelompok lain bahkan memperbesar kekuasaannya. Untuk mempertahankan dan juga memperbesar kekuasaan itu, dinasti Atut tidak mendistribusikan kekuasaannya kepada kelompok elit lain melainkan kepada kelompok elitnya yaitu keluarga. Upaya yang dilakukan untuk memperbesar kekuasaan itu dilakukan dengan menempatkan keluarga di kabupaten dan kota yang ada di Banten, salah satunya di Kota Tangerang Selatan.

Atut menikmati keuntungan dari kekuasaan itu yaitu dengan penguasaan proyek yang bersumber dari APBD. Hal ini terbukti atas ditetapkannya dia menjadi tersangka kasus korupsi dan harus menjalankan hukuman penjara. Meskipun “kepala” dari dinasti ini sudah di penjara, dinasti tetap eksis dan dapat ikut bahkan keluar sebagai pemenang Pilkada di daerah-daerah di Banten. Salah satunya adalah Pilkada Tangsel tahun 2020.

Kota Tangerang Selatan selama 10 tahun dijabat oleh Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar Atut. Untuk mempertahankan kekuasaan dinasti di Kota Tangsel, mereka menempatkan anggota keluarga lainnya yaitu Pilar Saga

Ichsan, yang merupakan keponakan Airin di Pilkada 2020. Bertahannya dinasti Atut di Pilkada Tangsel dikarenakan beberapa faktor yaitu menguasai internal partai politik yaitu Partai Golkar, jaringan organisasi masyarakat, modal ekonomi yang tinggi serta budaya politik dari masyarakat Tangsel itu sendiri.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

